



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. DALEM WIRAWANGSA KM. 1,2 MANGUNREJA KAB. TASIKMALAYA



RENSTRA

2021 - 2026

Rencana Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholders dalam kurun waktu tertentu.

Melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat terlihat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, serta digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat memberikan informasi dan menjadi parameter atau tolok ukur kinerja dari serangkaian rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2021-2026.

Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si.
NIP. 19630929 198503 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	III-16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis atau disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam Renstra memuat sasaran, tujuan, outcome yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan dengan mengakomodir berbagai kepentingan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja serta penyusunan anggaran setiap tahunnya berkenaan dengan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II, Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berisi gambaran pelayanan Dinas Pendidikan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan mengenai permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaahan visi, misi, dan program Bupati disertai faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati; selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Kabupaten/Kota; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV, Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026.

BAB VI, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII, menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII, Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tersebut tercantum penjelasan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

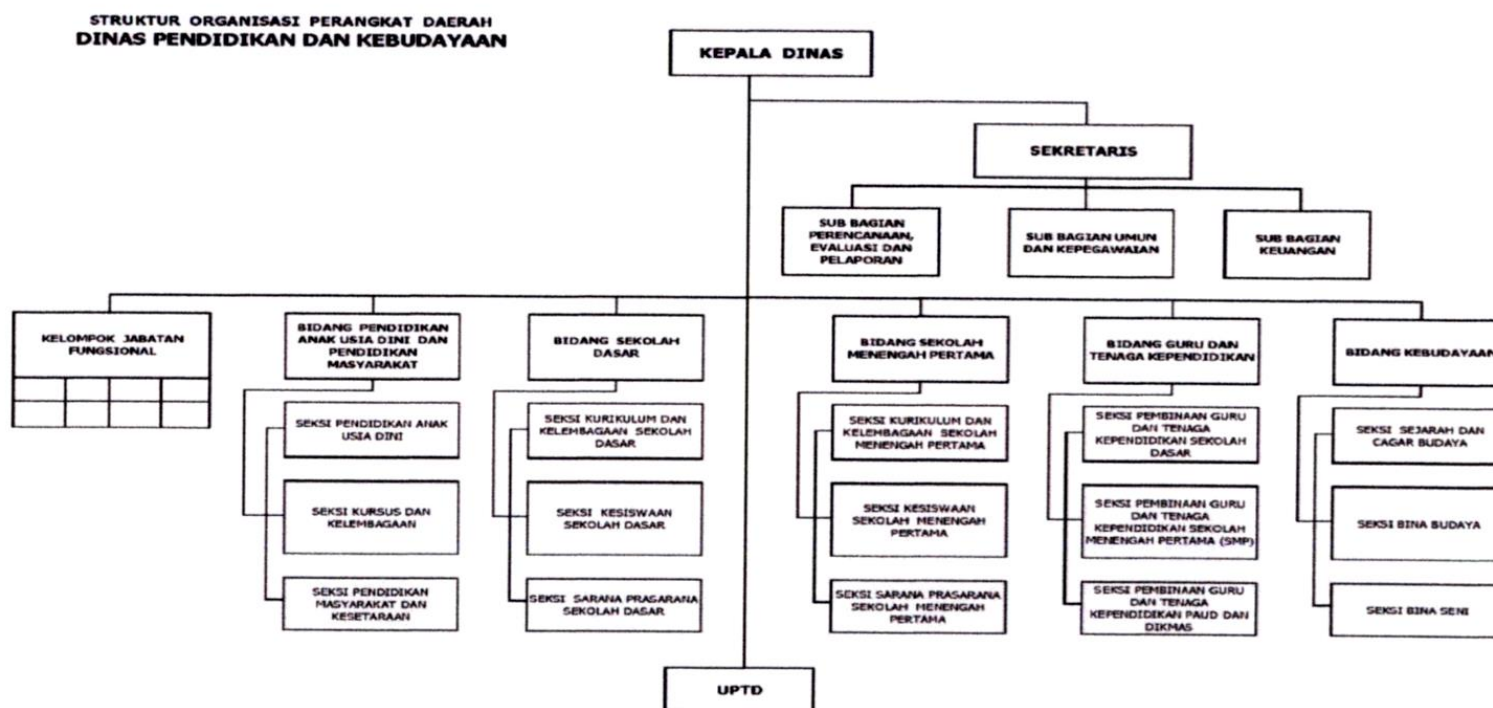
Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, adalah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, terdiri atas:
 - 1. seksi pendidikan anak usia dini;
 - 2. seksi kursus dan kelembagaan; dan
 - 3. seksi pendidikan masyarakat dan kesetaraan.
- d. bidang sekolah dasar, terdiri atas:
 - 1. seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar;
 - 2. seksi kesiswaan sekolah dasar; dan
 - 3. seksi sarana prasarana sekolah dasar.
- e. bidang sekolah menengah pertama, terdiri atas:
 - 1. seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
 - 2. seksi kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
 - 3. seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama.

- f. bidang guru dan tenaga kependidikan, terdiri atas:
 - 1. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - 2. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
 - 3. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- g. bidang kebudayaan, terdiri atas:
 - 1. seksi sejarah dan cagar budaya;
 - 2. seksi bina budaya; dan
 - 3. seksi bina seni.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Struktur Organisasi terdiri dari Kepala Dinas dan dibantu Sekretariat dan 5 Bidang serta 3 Sub Bagian 15 Kepala Seksi, UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel. 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	L	P	Jumlah	%
1	Jabatan Struktural	50	14	64	0.86
2	Jabatan Fungsional	395	617	1012	13.66
3	Jabatan Fungsional Tertentu	71	20	91	1.23
4	Jabatan Fungsional Guru	2335	3906	6241	84.25
Jumlah		2851	4557	7408	100

Tabel 2.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0.09
2	Eselon III	3	0.28
3	Eselon IV	60	5.88
4	Staf	1020	93.75
JUMLAH		1084	100

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	11	0.15
2	Strata 2	1076	14.52
3	Strata 1/Diploma IV	4388	59.23
4	Diploma 3	330	4.45
5	Diploma 2	390	5.26
6	Diploma 1	50	0.67
7	SLTA	1163	15.70
JUMLAH		7408	100.00

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	3985	53,84%
2	Golongan III	3273	44,22%
3	Golongan II	144	1,95%
JUMLAH		7408	100,00%

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 7.408 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 64 orang dan pegawai fungsional sebanyak 1.012 orang, pegawai fungsional guru sebanyak 6.241 orang dan pegawai fungsional tertentu sebanyak 91 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 64 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 3 orang, pejabat eselon IV sebanyak 60 orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPTD Pendidikan, staf berjumlah 1012 orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPTD Pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan dari tingkat SMP.

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 11 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 1.076 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 4388 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 330 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 390 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 50 orang, lulusan SLTA sebanyak 1.163 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 3.985 orang, golongan III sebanyak 3.273 orang, golongan II sebanyak 144 Orang, dan golongan I sebanyak 7 orang.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.5
Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
lima tahun terakhir (2016-2020)

Tahun	Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	% *)	Belanja Langsung (BL)	% *)
2016	940.335.720.596	706.523.732.696	75,14	233.811.987.900	24,86
2017	989.242.387.240	839.927.294.940	84,91	149.315.092.300	15,09
2018	1.134.158.597.516	1.010.134.946.128	89,06	124.023.651.388	10,94
2019	1.284.263.152.182	1.141.225.419.270	88,86	143.037.732.912	11,14
2020	1.286.557.875.396	1.164.561.842.040	90,52	121.996.033.356	9,48

Dilihat dari tabel di atas, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu ada kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	755	M2
2	Gedung Kantor Disdik	74,5	M2
3	Gedung UPTD	39	Unit
4	Gedung TKN	2	Unit
5	Gedung SDN	1.070	Unit
6	Gedung SMPN	137	Unit
7	Gedung SKB	1	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	13	Unit
2	Kendaraan roda dua	194	Unit
C	SARANA PERKANTORAN		
1	Komputer PC	33	Unit
2	Laptop/Book Note	27	Unit
3	Infocus	2	Unit
4	Kamera	2	Unit
D	SARANA PENUNJANG LAINNYA		
1	Jaringan	5	Line

A. Sarana Penunjang Lainnya

Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat

sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan adanya Dapodik, sekolah dapat melakukan pembaharuan data secara lengkap dan cepat dan dapat setiap waktu di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya Nilai IKM Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.				70	73	75	78	80	n/a	78	78.39	78	78.02	0.00	1.07	1.05	1.00	0.98
2	Pencapaian Nilai APIP				2	2	3	3	3	n/a	2	2	2	2	0.00	1.00	0.67	0.67	0.67
3	Hasil Penilaian SAKIP				C	CC	B	B	BB	n/a	BB	B	BB	BB	0.00	2.00	1.00	1.67	1.00
4	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).				62.25	65.00	68.00	71.00	75.00	59.25	76.11	66.56	78.6	75.69	0.95	1.17	0.98	1.11	1.01
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.				100	100	100	100	100	105.5	104.9	105.3	101.1	100.4	1.05	1.05	1.05	1.01	1.00
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat				95	96	97	98	99	97.76	96.76	98.61	95.7	93.65	1.03	1.01	1.02	0.98	0.95
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat				99.54	100	100	100	100	98.02	98.73	94.61	120.3	108.1	0.98	0.99	0.95	1.20	1.08
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat				75	80	85	90	95	79.91	79.44	84.39	95.55	90	1.07	0.99	0.99	1.06	0.95
9	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 - 12 tahun				165.30	150.27	200.01	220.01	242.01	150.3	141.1	148	143.6	145.7	0.91	0.94	0.74	0.65	0.60
10	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 tahun				210.44	191.31	254.63	280.10	308.11	191.3	227.4	243.9	174.4	199.9	0.91	1.19	0.96	0.62	0.65
11	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI				18.32	16.65	22.16	24	26	16.65	15.94	17.23	23.89	20.67	0.91	0.96	0.78	1.00	0.80
12	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs				12.58	14.00	18.00	22.00	28.00	12.58	11.97	15.75	26.59	16.78	1.00	0.86	0.88	1.21	0.60
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs				97.8	98.65	100	100	100	98.65	100	78.17	106.1	120.5	1.01	1.01	0.78	1.06	1.20

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase pemenuhan SPM PAUD				100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	78.6	92.97	0.00	0.00	0.00	0.79	0.93
15	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Dasar				100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	95.66	95.5	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96
16	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan kesetaraan				100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	0.009	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
17	Jumlah Warga Belajar Paket B Setara SMP				2500	3000	3000.00	3000	3000	2200	783	1.328	1.328	1.183	0.88	0.26	0.00	0.00	0.00
18	Jumlah Warga Belajar Paket C Setara SMA				3000	3500	3500	3500	3500	2010	2445	4.173	4.173	4.715	0.67	0.70	0.00	0.00	0.00
19	Jumlah PKBM Aktif				39	39	39	39	39	109	50	42	70	47	2.79	1.28	1.08	1.79	1.21
20	Jumlah LKP Aktif				25	25	25	25	25		47	26	47	39	0.00	1.88	1.04	1.88	1.56
21	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV				17	28	37	67	97	82.13	99.24	80.83	79.21	80.47	4.83	3.54	2.18	1.18	0.83
22	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikasi Guru.				49.59	55.00	60.00	65.00	70.00		49.59	92.24	47.79	51.41	0.00	0.90	1.54	0.74	0.73
23	Persentase Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik.				5.27	7.40	10.00	15.00	20.00	5.27	48.57	24.34	29.18	35.51	1.00	6.56	2.43	1.95	1.78
24	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.				12	17	22	27	32	n/a	12	71	91	91	0.00	0.71	3.23	3.37	2.84
25	Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar				2	5	10	15	20	n/a	5	26	26	3	0.00	1.00	2.60	1.73	0.15
26	Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP)				0	57	60	65	70	n/a	0	71	74	74	0.00	0.00	1.18	1.14	1.06

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,062	2,874	3,017	3,168	3,327	2,786	2,581	2,290	1,960	2,012	91.00	89.83	75.88	61.86	60.50	3,090	2,326
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,375	6,866	7,116	5,266	5,251	1,338	2,242	838	1,444	1,798	97.34	32.65	11.77	27.42	34.24	5,175	1,532
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	350	350	350	350	350	0	75	500	762	468	0.00	21.43	142.86	217.74	133.58	350	361
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGGARAN SKPD	100	100	100	100	100	29	100	693	29	30	29.31	100.00	692.59	29.47	30.00	100	176
PROGRAM PENINGKATAN PENEKAKAN PERATURAN DAERAH	200	100	100	100	100		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	0
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	3,340	784	784	934	934	3,179	1,243	746	963	801	95.19	158.57	95.13	103.16	85.79	1,355	1,387
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2,070	53,515	54,450	224,519	184,734	1,992	19,519	52,504	89,200	0	96.26	36.47	96.43	39.73	0.00	103,858	32,643
PROGRAM WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN	86,255	301,025	304,123	435,865	429,260	82,309	106,701	209,073	289,241	0	95.42	35.45	68.75	66.36	0.00	311,306	137,465
PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN	47,183	69,525	71,591	78,983	74,452	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,347	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BAGI KELUARGA MISKIN																	
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	0	0	50	195	390	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127	0
PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL	2,136	5,535	5,535	7,679	7,679	2,068	600	836	2,534	2,464	96.80	10.84	15.10	33.00	32.09	5,713	1,700
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2,955	55,451	55,463	62,251	62,251	2,938	1,555	5,254	6,544	12,142	99.43	2.80	9.47	10.51	19.51	47,674	5,687
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	300	550	300	300	300	295	519	0	200	0	98.41	94.28	0.00	66.67	0.00	350	203
PROGRAM BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	176,813	176,605	173,794	177,270	180,816	0	176,348	161,851	177,834	195,953	0.00	99.85	93.13	100.32	108.37	177,060	142,397
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	0	350	350	350	350	0	50	140	710	199	0.00	14.29	39.86	202.71	56.97	280	220
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	0	855	930	930	930	0	244	711	189	199	0.00	28.50	76.50	20.28	21.35	729	268
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	0	2,425	22,465	10,465	7,465	0	271	741	1,194	150	0.00	11.17	3.30	11.41	2.00	8,564	471

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Pada bidang pendidikan terdapat beberapa tantangan diantaranya yaitu :

- Aspek kualitas dan relevansi serta tata kelola Pendidikan belum secara optimal tertangani. Rendahnya penanganan aspek kualitas dan relevansi pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas lulusan terutama lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, proses dan muatan pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan, serta kualifikasi tenaga pendidik yang bukan berdasarkan kompetensi.
- Rendahnya kualitas aspek tata kelola Pendidikan ditunjukkan dengan birokrasi manajemen pelayanan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, serta data dan informasi yang belum terkelola secara profesional dan berbasis teknologi terkini.
- Penyediaan tenaga pengajar adalah ketidakmerataan keberadaan tenaga pengajar antara perkotaan dan perdesaan, sehingga sering terjadi kelangkaan tenaga guru di daerah-daerah tertentu.
- Rendahnya angka partisipasi sekolah untuk tingkat lanjutan (SLTP dan SLTA), hal ini sangat mempengaruhi pada program penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun.
- Masih banyaknya fasilitas ruang belajar yang kondisi ruangnya perlu diperbaiki.
- Dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi

guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal.

- Pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan, dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah, melalui pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan ber peradaban global.
- Bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat.
- Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tingginya persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
- Sejalan dengan perkembangan jaman pemberdayaan lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan.
- Pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan

penanganan yang optimal.

- Masih banyak tenaga guru yang berstatus Non PNS yang mengakibatkan rendahnya kinerja karena ketidakpastian masa depan guru non PNS.
- Belum meratanya kinerja tenaga guru, karena keterbatasan pembinaan.
- Masih sedikitnya kuota guru yang disertifikasi
- Masih minimnya Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat serta pengembangan kebudayaan di daerah;

- b. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- c. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- d. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- e. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- f. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- g. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas.

2. KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Belum adanya peraturan daerah tentang pengembangan kebudayaan daerah yang menjadi sumber hukum pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
- b. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;
- c. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- d. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;

- e. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- f. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Lingkungan Eksternal PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar;
- f. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di eksternal maupun internal dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;
- c. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan; Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNFI dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, tentunya tidak dapat semua mencapai target kondisi yang diharapkan sesuai dengan perencanaan. Permasalahan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan pada umumnya berasal dari potensi sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, adanya kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang belum dapat diantisipasi.

Dalam rangka menyusun rencana strategi pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2021-2026 tentunya perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang kemungkinan akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sehingga rencana strategis ini disusun dengan meminimalkan atau dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan

diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan dimasa lalu.

Selanjutnya, berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di pendidikan dan kebudayaan dapat diidentifikasi berdasarkan layanan dimasing-masing bidang, sebagai berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Angka Partisipasi Sekolah Rendah	Masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak terdaftar di sekolah	1. Kemampuan ekonomi keluarga rendah
			2. Akses ke sekolah jauh
			3. Infrastruktur ke sekolah tidak memadai
2	Ruang Kelas Rusak	Masih tidak seimbang antara tingkat kerusakan dengan jumlah alokasi anggaran	1. Anggaran pemeliharaan sekolah belum optimal
			2. Minimnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi
			3. Swadaya masyarakat berkurang
3	Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Masih tidak seimbang antara alokasi anggaran infrastruktur dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Belum optimalnya alokasi anggaran peningkatan mutu di sekolah
			2. Minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Masih rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik
4	Masih minimnya seni tradisional dan budaya yang terkelola	Belum optimalnya pelestarian dan pemeliharaan seni dan budaya daerah	1. Belum adanya sumber daya manusia penilai seni dan budaya daerah yang tersertifikasi
			2. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pelestarian seni dan budaya daerah
			3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotongroyong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, AlKahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (Bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah: **1) ‘Salm’ (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”;** **3) Saliim’ (yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat

Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bias saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.2
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Religius/Islami	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan</i>

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		melayani, bersih, dan profesional;	<i>fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai impact makro jangka menengah daerah, meliputi :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi dan Tujuan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan anusia (IPM)	Poin	65.67	65.93	66.198	66.45	66.71	66.97	67.23
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektorsektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0.98	1-2	1-3	2-3	2-4	2-4	3-4
4	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Juta	7.292,07	7.883,46	8.041,13	8.201,95	8.365,99	8.533,31	8.703,98

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

Tabel 3.4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami,
Berdaya Saing, Dan Sejahtera

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.												
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.81	60.31	60.81	61.31	61.81	62.31	62.31
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.15	76.5	76.9	77.3	77.7	78.1	78.1
		S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	I.3 Persentase Penduduk Miskin	%	10.34	10.23	10.03	9.81	9.61	9.41	9.21	9.21
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	23.15	23.15
		S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	86.16	86.23	86.3	86.37	86.44	86.44
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	610 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	635 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	3.36 (Sedang)	3.38 (Sedang)	3.40 (Sedang)	3.42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
			I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
			I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80.15 Baik	80.30 Baik	80.50 Baik	80.50 Baik
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	NA	76.14	77.90	78.20	79.70	79.85	80.60	80.60

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56.73	57	58	59	60	61	62	62
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif)	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.												
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektorsektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud menetapkan Visi Kemendikbud 2020-2024 :

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemdikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi disemua jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan

masyarakat. Berkaitan dengan guru, kebijakan merdeka belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud RI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Peningkatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Renstra Dinas Pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tidak lepas dari visi, misi serta program kepala daerah. Pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif merupakan acuan utama yang harus dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Salah satu misi yang harus dicapai dalam kaitannya dengan pembangunan di bidang pendidikan adalah “Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang

inovatif". Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga seluruh rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan dengan adil dan merata.

Pengembangan dari misi tersebut melahirkan beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang akan bisa dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di bidang pendidikan. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yaitu Sekolah Juara. Sekolah Juara yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat memiliki makna sekolah yang bersifat inklusif artinya bahwa usia anak sekolah dapat mengakses pendidikan tidak terhambat oleh anak yang bekebutuhan khusus, terhambat kondisi geografi, terbelakang oleh adat setempat, terhambat oleh masalah ekonomi maupun dampak bencana yang ditimbulkan.

Untuk mewujudkan Sekolah Juara, sejumlah prioritas kegiatan yang kemudian menjadi Instruksi Khusus Pimpinan (IKP) akan dilakukan yang disebut dengan program Pendidikan Jabar Juara, yaitu:

1. Sakola Jabar Juara (Sajajar)

Sakola Jabar Juara (Sajajar) merupakan inovasi layanan Pendidikan menengah di Jawa Barat dengan layanan pendidikan tanpa terhalang factor ekonomi, geografis, sosial, budaya, dan lainnya.

2. Jabar Masagi

Jabar Masagi merupakan program pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti sehingga dapat terwujud generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat, dan cerdas.

3. Program Pinjam Pakai Gawai dan Sekolah Tanpa Gawai
Pinjam pakai Gawai untuk siswa/siswi SMK, SMA, dan SLB se Jawa Barat untuk menunjang pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 melalui Pembelajaran Jarak Jauh.
4. Sekolah Terintegrasi/Satu Atap/Terpadu
SMP-SMA Terintegrasi merupakan program peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan berbasis wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) yang diintegrasikan dengan program pembinaan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Lembaga yang terkait lainnya.
5. Guru Juara
Program Guru Juara diantaranya adalah tunjangan profesi kepada Guru Non PNS dari APBN dan penyediaan rumah subsidi bagi para penyelenggara pendidikan di Jawa Barat.
6. SMK Juara
Program ini dilakukan dalam rangka perbaikan proses cara, strategi terhadap organisasi, personal dan teknologi yang membuat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mampu tumbuh, berkembang, atau menjadi sukses lagi guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia.
7. Perguruan Tinggi Juara melalui Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)
Merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan jenjang D-3, D-4, S-1, S-2, dan S-3 yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah :

1. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka mendorong pembangunan Jawa Barat;
2. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Barat yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
3. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kualitas rencana bidang pariwisata dan kebudayaan; Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pariwisata dan kebudayaan dan Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran

Sasaran Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Barat;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Barat;

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;
4. Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
5. Meningkatnya masyarakat yang berkarakter, berjatidiri dengan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi dan nilai-nilai budaya;
6. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya daerah;
7. Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Kebudayaan disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
3. Pengembangan Pusat Budaya Jawa Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghendaki terciptanya pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Penataan ruang Kabupaten Tasikmalaya bertujuan mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Untuk menciptakan tata ruang wilayah seperti yang dikehendaki tersebut, maka diperlukan ketertiban dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, sangat dipengaruhi oleh daya dukung, daya tampung lingkungan, dan penatagunaan lahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :

1. Kawasan Obyek Wisata Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;
2. Kawasan Obyek Wisata Situs Denuh berada di Kecamatan Culamega;
3. Kawasan Obyek Wisata Situs Kabuyutan Nagaratengah berada di Kecamatan Cineam;
4. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;
5. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Joglo Seikh Zaenudin berada di Kecamatan Cipatujah;
6. Kawasan Desa Budaya berada di Kecamatan Salawu; dan
7. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Syech Tubagus Anggariji berada di Kecamatan Sodonghilir.

Permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil konsultasi publik mencakup isu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dari konsultasi publik yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020 didapatkan 36 isu pembangunan berkelanjutan strategis, dan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan adalah masih rendahnya angka partisipasi sekolah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan isu strategis dalam urusan pendidikan berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Pendidikan Jarak Jauh atau Belajar dari Rumah merupakan salah satu alternatif ditengah meningkatnya penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan metode Dalam Jaringan (Daring) dan/atau Luar Jaringan (Luring), dibutuhkan strategi komprehensif untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Dimana diujung tahun ini akan mulai dilaksanakan Asesmen Kompetensi Nasional jenjang SD dan SMP yang dilaksanakan berbasis komputer. Diperlukannya pendidik yang mumpuni untuk beradaptasi dengan situasi pandemi ini dan perkembangan teknologi informasi menjelang era 5.0 di ujung 4.0. Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Stakholder yang ada di sekolah bisa beradaptasi secara cepat dengan perkembangan situasi global yang semakin cepat.

Disamping perubahan global dan situasi pandemi yang berkembang, Kabupaten Tasikmalaya masih menyisakan permasalahan terkait dengan masih adanya anak usia sekolah yang belum tamat pendidikan dasar dan menengah ditengah

akselerasi percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan serta masih adanya pendidik yang masih memiliki kualifikasi belum S1, terutama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada situasi pandemi covid-19 ini juga yang terdampak adalah para Seniman dan Sanggar atau kelompok Kesenian. Dimana minimnya pagelaran atau even seni dan budaya yang digelar di tengah pandemi. Selain itu masih minimnya anggaran untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya terutama untuk mengejar Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari kondisi di atas dapat ditentukan isu strategis pada pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- a. Pada Aksesibilitas Layanan pendidikan
 1. Kemampuan ekonomi masyarakat untuk pendidikan masih rendah;
 2. Masih belum meratanya pelayanan pendidikan;
 3. Distribusi dan pemenuhan guru belum merata.
- b. Pada Mutu Layanan Pendidikan
 1. Kompetensi GTK yang masih rendah;
 2. Kesenjangan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan;
 3. Penguatan karakter peserta didik dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan berbasis keagamaan masih belum optimal;
- c. Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah
 1. Minimnya anggaran untuk pelestarian, pengembangan dan promosi seni dan budaya daerah

2. Masih kurangnya SDM penilai cagar/situs budaya;
 3. Revitalisasi dan pemeliharaan cagar/situs belum optimal;
- d. Tata kelola kelembagaan layanan pendidikan
1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan monev belum optimal;
 2. Kesenjangan pemenuhan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia;
 3. Sistem informasi dinas belum optimal dan terintegrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau *objektif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang dimiliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian dan Berakhlakul Karimah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat		Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)	Tahun	12.58	12.64	12.70	12.76	12.82	12.88
		1.1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Poin	N/A	50	50,20	50,40	50,60	50,80
		1.2	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Persen	76.69	77.69	78.89	80.11	81.33	81.58

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya			Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	22.82
			Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	19,68	21,18	22,68	24,18	25,68	27,18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA
MISI 1	: MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING, BERKEPRIBADIAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3		4	
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	1.1	Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akuntabel	1.1.1	Meningkatkan sistem pelaporan dan kinerja yang akuntabel	1.1.1.1	Perbaiki sistem pelaporan dan kinerja pemerintah yang akuntabel
						1.1.1.2	Memaksimalkan fungsi layanan berdasarkan SOP
		1.2	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	1.2.1	Meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan	1.2.1.1	Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan/Masyarakat
						1.2.1.2	Mapping sekolah yang mempunyai jumlah siswa dibawah standar

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3		4	
				1.2.2	Memberikan kemudahan aksesibilitas bagi anak usia sekolah secara merata	1.2.2.1	Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan
				1.2.3	Penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SPM	1.2.3.1	Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta harus sesuai dengan SPM
				1.2.4	Penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SNP	1.2.4.1	Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta harus sesuai dengan SNP
				1.2.5	Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku	1.2.5.1	Mengimplementasikan kurikulum yang berlaku bagi seluruh sekolah
				1.2.6	Meningkatkan kualitas peserta didik berbasis pendidikan keagamaan	1.2.6.1	Memasukan nilai-nilai agama dalam pembelajaran
						1.2.6.2	Penambahan Jam pembelajaran agama melalui Ajengan Masuk Sekolah

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3		4	
				1.2.7	Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata	1.2.7.1	Memberikan sosialisasi serta bimtek bagi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah tentang penilaian kinerja
						1.2.7.2	Memberikan insentif bagi Guru honorer untuk memenuhi sertifikasi
2	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	2.1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	2.1.1	Melestarikan Nilai Budaya dan kearifan lokal melalui pemanfaatan dan implementasi seni budaya	2.1.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah
						2.1.1.2	Revitalisasi fungsi cagar budaya dan Musium Lokal
						2.1.1.3	Fasilitasi Pelaku Seni dan Budaya Tasikmalaya

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal

maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat serta pengembangan kebudayaan di daerah;
- b. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- c. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- d. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- e. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- f. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- g. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas.

2. KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Belum adanya peraturan daerah tentang pengembangan kebudayaan daerah yang menjadi sumber hukum pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
- b. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;
- c. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- d. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- e. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- f. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Lingkungan Eksternal PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;

- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar;
- f. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di eksternal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;
- c. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan; Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNFI dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan Pendidikan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)	12,53 Tahun	12,58 Tahun		12,64 Tahun		12,7 Tahun		12,76 Tahun		12,82 Tahun		12,88 Tahun				
	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat			Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	75,71 Persen	76,69 Persen		77,67 Persen		78,65 Persen		80,11 Persen		81,33 Persen		81,58 Persen				
		1.01.02	PROGRAM PENGUSAHAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	89,82 % 92,84 % 97,72 % 99,22 %	100 % 100 % 100 % 100 %	74.135.420.480 41.667.387.300 192.885.854.174 0.731210.000	100 % 100 % 100 % 100 %	467.723.975.330 103.009.097.250 766.327.327.250 29.978.206.470	100 % 100 % 100 % 100 %	338.221.517.138 184.844.545.066 453.849.256.071 33.432.614.064	100 % 100 % 100 % 100 %	348.878.642.651 202.193.811.830 485.244.734.577 34.436.192.890	100 % 100 % 100 % 100 %	358.784816.531 208.162.478.295 478.081.776.615 33.493.670.015	100 % 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	93,63 %	93,99 %	149.593.420.936	96,73 %	300.154.079.350	97,51 %	318.756.702.003	99,27 %	326.099.403.127	100 %	334.762.095.221	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100,39 %	100,32 %	33.292.225.320	100,25 %	399.573.448.200	100,19 %	135.092.554.806	100,11 %	139.745.331.450	100,04 %	143.319.691.394	100,00 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90 %	90,01 %	48.406.729.040	91,62 %	330.160.777.630	92,45 %	179.601.090.501	93,24 %	185.499.947.207	94,00 %	191.494.645.695	94,06 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,39 %	100,32 %	25.668.711.440	100,25 %	137.563.197.500	100,19 %	158.629.826.587	100,11 %	163.398.515.364	100,04 %	168.290.170.846	100,00 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	75,69 %	76,69 %	41.467.397.300	78,6 %	180.009.097.650	79,6 %	194.864.545.496	79,6 %	202.418.681.830	78,6 %	209.162.478.295	80,6 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Nonsektoral	Persentase satuan pendidikan kesetaraan (terakreditasi)	41,3 %	50 %	8.751.270.200	50,89 %	29.878.266.470	67,89 %	33.452.614.464	76,09 %	34.456.192.898	79,16 %	35.489.870.685	84,78 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	405.000.000	100 %	405.000.000	0 %	0	0 %	0			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	4 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	405.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Nonsektoral	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Nonsektoral	2 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	405.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.04	PROGRAM PENYDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	51,18 %	0 %	0	53,18 %	500.000.000	55,18 %	450.000.000	57,18 %	340.000.000	58,18 %	300.000.000	61,38 %	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan	11011 Orang	0 Orang	0	7572 Orang	501,000,000	15388 Orang	450,000,000	15417 Orang	350,000,000	16135 Orang	300,000,000	16594 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.05	PROGRAM PENGELOMPOKAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pendidikan dasar, PAUD dan PMF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	100 %	0 %	0 %	0	0	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0	
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	166 Sekolah	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	166 Sekolah	100,000,000	166 Sekolah	100,000,000	170 Sekolah	100,000,000	172 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PMF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	1548 Lembaga	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah-jaring SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal bahasa Sunda	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	0	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lokakarya bahasa sunda	100 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	135,000,000	50 Orang	135,000,000	50 Orang	135,000,000	50 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya				Persentase Pemajuan Kebudayaan	NA %	20,72 %		21,83 %		22,16 %		22,49 %		22,82 %		22,82 %		
	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah			Persentase pelestarian warisan budaya	19,68 Person	19,68 Person		21,18 Person		22,68 Person		24,18 Person		25,68 Person		27,18 Person		
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terakreditasi	20 %	30 %	2,525,000,000	30,5 %	3,439,865,022	31 %	1,024,820,000	31,5 %	1,859,316,400	32 %	1,094,502,728	32,5 %	0	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi	4 Event	4 Event	1,700,000,000	4 Event	591,806,275	4 Event	602,820,000	4 Event	614,876,400	4 Event	627,173,928	4 Event	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kebudayaan yang digelar	5 Event	11 Event	825,000,000	11 Event	2,849,058,747	11 Event	1,122,000,000	11 Event	1,144,440,000	11 Event	1,167,328,800	11 Event	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	33 Objek	0 Objek	0	0 Objek	0	35 Objek	100,000,000	35 Objek	100,000,000	35 Objek	100,000,000	35 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	25 %	0 %	0	35 %	399,999,800	40 %	408,000,000	45 %	412,120,000	50 %	418,362,400	55 %	0	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkun/sanggar seni	71 Sanggar	0 Sanggar	0	73 Sanggar	399,999,800	74 Sanggar	406,000,000	77 Sanggar	412,120,000	79 Sanggar	418,362,400	81 Sanggar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	0 %	0 %	0	0 %	0	6 %	50,000,000	7 %	50,000,000	8 %	50,000,000	9 %	0	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sgarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah manuskrip sejarah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2.22.05	PROGRAM PRESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	45 %	0 %	0	0 %	0	45,5 %	730,000,000	46 %	630,000,000	46,5 %	630,000,000	47 %	0	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya	45 Cagar	0 Cagar	0	0 Cagar	0	47 Cagar	100,000,000	0 Cagar	0	0 Cagar	0	47 Cagar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	42 Cagar	0 Cagar	0	0 Cagar	0	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)	12,53 Tahun	12,58 Tahun		12,64 Tahun		12,7 Tahun		12,76 Tahun		12,82 Tahun		12,88 Tahun		
				Nilai RB	NA Poin	NA Poin		50 Poin		50,2 Poin		50,4 Poin		50,6 Poin		50,8 Poin		
	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Nilai IKM	74,23 Poin 78,02 Poin	74,33 Poin 78,07 Poin	910,776,411,352 1,942,606,546	74,43 Poin 78,12 Poin	1,034,492,547,082 7,211,423,113	74,53 Poin 78,17 Poin	1,137,985,101,845 8,097,165,424	74,63 Poin 78,22 Poin	1,251,822,612,246 7,237,176,750	74,73 Poin 78,27 Poin	1,376,972,372,428 7,809,080,218	74,83 Poin 78,32 Poin	0 0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	71,241,740	100 %	154,999,950	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	100 %	100 %	910,705,169,612	100 %	1,034,337,547,132	100 %	1,137,825,101,845	100 %	1,251,662,612,246	100 %	1,376,812,372,428	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi barang milik daerah	100 %	100 %	157,416,430	100 %	330,916,900	100 %	364,008,590	100 %	400,408,450	100 %	440,450,394	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	100 %	100 %	915,780,296	100 %	2,165,838,813	100 %	2,382,422,694	100 %	2,517,299,750	100 %	2,773,700,326	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perundang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang milik daerah	100 %	0 %	0	100 %	1,540,000,000	100 %	1,619,100,000	100 %	495,000,000	100 %	385,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Perundang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa perundang ususan pendidikan	100 %	100 %	419,409,820	100 %	1,751,933,000	100 %	1,927,126,300	100 %	1,969,508,950	100 %	2,131,822,823	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	450,000,000	100 %	1,422,734,400	100 %	1,504,507,840	100 %	1,504,958,600	100 %	1,728,106,675	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dan kebudayaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Pada tabel di bawah ini indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
A.08	Angka melek huruf	%	99,75	99.8	99.85	99.95	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.09	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,35	7,48	7.51	7.54	7.62	7.7	7.78	7.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan										
C.1.01.01	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12.54	12.55	12.56	12.57	12.58	12.59	12.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.02	APK PAUD	%	75.69	76.69	79.6	79.6	79.6	79.6	80.6	80.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.03	APK SD	%	100.39	100.32	100.25	100.18	100.11	100.04	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.04	APM SD	%	93.65	93.99	95.75	97.51	99.27	100	100	100.00	Dinas Pendidikan

C. ASPEK PELAYANAN UMUM												
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1	Pendidikan											
												dan Kebudayaan
C.1.01.05	APK SMP	%	108.09	106.74	105.39	104.04	102.69	101.34	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.06	APM SMP	%	90.00	90.81	91.62	92.43	93.24	94.05	94.86	94.86	94.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.07	Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.08	Persentase PKBM yang meynelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	52.08%	57.08%	62.08%	67.08%	72.08%	77.08%	82.08%	0.82	0.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.09	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Literasi) memenuhi kompetisi minimum	%	57.72	57.70	58.20	58.70	59.20	59.70	60.20	60.20	60.20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.10	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi	%	26.5	26.75	27.00	27.25	27.50	27.75	28.00	28.00	28.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. ASPEK PELAYANAN UMUM												
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1	Pendidikan											
	(Numerasi) memenuhi kompetisi minimum											
C.1.01.11	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandingan	1:20	1:21	1:22	1:25	1:26	1:27	1:29	1:29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.12	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandingan	1:16	1:17	1:19	1:20	1:22	1:23	1:24	1:24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.13	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	0.00007	0.00006	0.00005	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.14	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	0.00019	0.00017	0.00015	0.00013	0.00011	0.00009	0.00007	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.15	Persentase siswa SD berasal dari PAUD	%	65	66	68	70	72	74	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.16	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3	3.1	3.25	3.5	3.7	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
C.1.01.17	Persentase Lulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

C. ASPEK PELAYANAN UMUM												
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1	Pendidikan											
C.1.01.18	Persentase Lulusan Pendidikan Kursus dan Keterampilan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.19	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1 bersertifikat pendidik	Persen	51.18	53.18	55.18	57.18	59.18	61.18	63.18	63.18		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.20	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat kepala sekolah	Persen	91.66	92	95	98	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.21	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	99	99.22	99.44	99.66	99.88	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.22	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan	%	82	82.06	82.12	82.18	82.24	82.3	82.36	82.36		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan										
	minimum dalam: (ii) Matematika										
C.1.01.23	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.24	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	98.49	99.33	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.25	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	%	99.92	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.26	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan	%	95.09	96.2	97.31	98.42	99.53	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan										
	minimum dalam: (ii) Matematika										

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
16	Kebudayaan										
C.2.16.01	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	1	1	1	2	2	3	3	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.02	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	1	1	2	2	3	3	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.03	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.04	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.05	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	42	43	43	43	44	44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.06	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	18.18	19.68	21.18	22.68	24.18	25.68	26.18	26.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
16	Kebudayaan										
C.2.16.07	Persentase pembinaan seni dan budaya daerah	Persen	28.17	28.67	29.17	29.67	30.17	31.67	32.17	32.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan Renstra ini dapat mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang ditandai dengan kemajuan dan peningkatan dalam pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya serta dukungan semua pihak terkait, stakeholders dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tata kelola layanan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya mudah-mudahan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

Semoga dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu : ” *Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera*”.

Tasikmalaya, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si.
NIP. 19630929 198503 1 013

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)	12,53 Tahun	12,58 Tahun	12,64 Tahun	12,7 Tahun	12,76 Tahun	12,82 Tahun	12,88 Tahun								
Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	75.71 Persen	76,69 Persen	77,67 Persen	78.89 Persen	80.11 Persen	81.33 Persen	81.58 Persen								
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	89,82 % 92,84 % 97,72 % 99,22 %	100 % 100 % 100 % 100 %	74,155,420,480 41,467,397,300 182,885,654,176 8,751,270,000	100 % 100 % 100 % 100 %	467,723,975,330 180,009,097,050 766,327,527,750 29,978,266,470	100 % 100 % 100 % 100 %	338,231,517,138 194,844,545,466 453,849,256,871 33,452,614,464	100 % 100 % 100 % 100 %	348,878,462,651 202,419,881,830 465,234,734,577 34,456,192,898	100 % 100 % 100 % 100 %	359,784,816,531 209,162,478,285 478,081,776,615 35,489,878,685	100 % 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	93,65 %	93,99 %	149,593,428,856	95,75 %	366,754,079,550	97,51 %	318,756,702,065	99,27 %	326,089,403,127	100 %	334,762,085,221	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100,39 %	100,32 %	33,292,225,320	100,25 %	399,573,448,200	100,18 %	135,092,554,806	100,11 %	139,145,331,450	100,04 %	143,319,691,394	100,00 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90 %	90,81 %	48,486,709,040	91,62 %	330,160,777,830	92,43 %	179,601,890,551	93,24 %	185,489,947,267	94,05 %	191,494,645,685	94,86 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,39 %	100,32 %	25,668,711,440	100,25 %	137,563,197,500	100,18 %	158,629,626,587	100,11 %	163,388,515,384	100,04 %	168,290,170,846	100,00 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	75,69 %	76,69 %	41,467,397,300	79,6 %	180,009,097,050	79,6 %	194,844,545,466	79,6 %	202,419,881,830	79,6 %	209,162,478,285	80,6 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	41,3 %	50 %	8,751,270,000	58,69 %	29,978,266,470	67,39 %	33,452,614,464	76,09 %	34,456,192,898	79,16 %	35,489,878,685	84,78 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	405,000,000	100 %	405,000,000	0 %	0	0 %	0		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	4 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	405,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal ditetapkan	2 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	405,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	51,18 %	0 %	0	53,18 %	500,000,000	55,18 %	450,000,000	57,18 %	350,000,000	59,18 %	300,000,000	61,38 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan	11011 Orang	0 Orang	0	7572 Orang	500,000,000	15388 Orang	450,000,000	15417 Orang	350,000,000	16135 Orang	300,000,000	16594 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pendidikan dasar, paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0		
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	166 Sekolah	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	166 Sekolah	100,000,000	168 Sekolah	100,000,000	170 Sekolah	100,000,000	172 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	1548 Lembaga	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	150,000,000	1560 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal Bahasa Sunda	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	0		
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lokakarya bahasa sunda	100 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	135,000,000	50 Orang	135,000,000	50 Orang	135,000,000	50 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya				Persentase Pemajuan Kebudayaan	NA %	20,72 %		21,83 %		22,16 %		22,49 %		22,82 %		22,82 %			
	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah			Persentase pelestarian warisan budaya	19,68 Persen	19,68 Persen		21,18 Persen		22,68 Persen		24,18 Persen		25,68 Persen		27,18 Persen			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	20 %	30 %	2,525,000,000	30,5 %	3,439,865,022	31 %	1,824,820,000	31,5 %	1,859,316,400	32 %	1,894,502,728	32,5 %	0		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi	4 Event	4 Event	1,700,000,000	4 Event	590,806,275	4 Event	602,820,000	4 Event	614,876,400	4 Event	627,173,928	4 Event	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kebudayaan yang digelar	5 Event	11 Event	825,000,000	11 Event	2,849,058,747	11 Event	1,122,000,000	11 Event	1,144,440,000	11 Event	1,167,328,800	11 Event	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	35 Objek	0 Objek	0	0 Objek	0	35 Objek	100,000,000	35 Objek	100,000,000	35 Objek	100,000,000	35 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	25 %	0 %	0	35 %	399,999,800	40 %	406,000,000	45 %	412,120,000	50 %	418,362,400	55 %	0		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lingkup/sanggar seni	71 Sanggar	0 Sanggar	0	73 Sanggar	399,999,800	74 Sanggar	406,000,000	77 Sanggar	412,120,000	79 Sanggar	418,362,400	81 Sanggar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	0 %	0 %	0	0 %	0	6 %	50,000,000	7 %	50,000,000	8 %	50,000,000	9 %	0		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah manuskrip sejarah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	45 %	0 %	0	0 %	0	45,5 %	730,000,000	46 %	630,000,000	46,5 %	630,000,000	47 %	0		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya	45 Cagar	0 Cagar	0	0 Cagar	0	47 Cagar	100,000,000	0 Cagar	0	0 Cagar	0	47 Cagar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	42 Cagar	0 Cagar	0	0 Cagar	0	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	630,000,000	42 Cagar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)	12,53 Tahun	12,58 Tahun		12,64 Tahun		12,7 Tahun		12,76 Tahun		12,82 Tahun		12,88 Tahun			
	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD			Nilai RB	NA Poin	NA Poin		50 Poin		50,2 Poin		50,4 Poin		50,6 Poin		50,8 Poin			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Nilai IKM	74,23 Poin 78,02 Poin	74,33 Poin 78,07 Poin	910,776,411,352 1,942,606,546	74,43 Poin 78,12 Poin	1,034,492,547,082 7,211,423,113	74,53 Poin 78,17 Poin	1,137,985,101,845 8,097,165,424	74,63 Poin 78,22 Poin	1,251,822,612,246 7,237,176,750	74,73 Poin 78,27 Poin	1,376,972,372,428 7,809,080,218	74,83 Poin 78,32 Poin	0 0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	71,241,740	100 %	154,999,950	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	100 %	100 %	910,705,169,612	100 %	1,034,337,547,132	100 %	1,137,825,101,845	100 %	1,251,662,612,246	100 %	1,376,812,372,428	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi barang milik daerah	100 %	100 %	157,416,430	100 %	330,916,900	100 %	364,008,590	100 %	400,409,450	100 %	440,450,394	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	100 %	100 %	915,780,296	100 %	2,165,838,813	100 %	2,382,422,694	100 %	2,517,299,750	100 %	2,773,700,326	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang milik daerah	100 %	0 %	0	100 %	1,540,000,000	100 %	1,619,100,000	100 %	495,000,000	100 %	385,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pendidikan	100 %	100 %	419,409,820	100 %	1,751,933,000	100 %	1,927,126,300	100 %	1,969,508,950	100 %	2,131,822,823	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	450,000,000	100 %	1,422,734,400	100 %	1,504,507,840	100 %	1,504,958,600	100 %	1,728,106,675	100 %	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	